



**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN JUMLAH PENDUDUK
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PADA PROVINSI SUMATERA
UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**RIZKI JAMILAH RANGKUTI
1515210109**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Adapun judul pada penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistik, yakni dengan menggunakan analisis regresi berganda yang pengelolahannya dilakukan dengan program SPSS Versi 16. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa Nilai t_{hitung} sebesar 1,631 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,654 dan signifikan sebesar 0,104, sehingga t_{hitung} $1,631 < t_{tabel}$ 1,654 dan signifikan $0,104 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, yang menyatakan Index Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Nilai t_{hitung} sebesar 2,057 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,654 dan signifikan sebesar 0,041, sehingga t_{hitung} $2,057 > t_{tabel}$ 1,654 dan signifikan $0,041 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Nilai t_{hitung} sebesar 5,145 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,654 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga t_{hitung} $5,145 > t_{tabel}$ 1,654 dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : (Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan)

ABSTRACT

The title of this research is the Effect of Communication, Motivation and Work Discipline on the Performance of Medan Champion cafe employees. This study aims to find out more clearly how the influence of Communication, Motivation and Work Discipline on Employee Performance. This research uses quantitative methods involving 47 respondents. Data collection is done by using questionnaires. The data obtained were analyzed using statistical formulas, namely by using multiple regression analysis, the management of which was carried out with the SPSS Version 16. The quantitative analysis results showed that the t-value was 3.438 while the t-table was 2.02 and significant was 0.001, so the t-test was $3.438 > t_{table} 2,02$ and significant $0,000 < 0.05$, then H_a is accepted and H_0 is rejected, which states that partially communication has a positive and significant effect on employee performance in Champion café Medan. Tcount value is 0.43 while ttable is 2.02 and significant is 0.000, so tcount $7.072 > t_{table} 2.02$ and significant $0.000 < 0.05$, then H_a is accepted and H_0 is rejected, which states that partially work motivation has positive and significant effect on the performance of employees at Champion café Medan. Tcount value is 7.62 while ttable is 2.02 and significant is 0.000, so tcount $0.544 < t_{table} 2.02$ and significant $0.589 > 0.05$, then H_a is rejected and H_0 is accepted, which partially states that work discipline has no significant effect on employee performance at Champion café Medan. Fcount value is 90.992 while Ftable is 2.83 which can be seen at $\alpha = 0.05$ (see appendix table F). Significant probability is much smaller than 0.05 which is $0,000 < 0.05$, then the regression model can be said that in this study communication, work motivation, and work discipline significantly influence employee performance in Champion café Medan.

Keywords: (Communication, Motivation, Work Discipline, Performance)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
F. Keaslian Peneliti.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	15
B. Kemiskinan.....	15
C. Indeks Pembangunan Manusia.....	20
D. Jumlah Penduduk	
E. Pengangguran	25
F. PenelitianTerdahulu.....	27

G. Kerangka Konseptual.....	32
H. Hipotesis.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
1. Lokasi Penelitian.....	34
2. Waktu Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel.....	35
1. Populasi.....	35
2. Sampel.....	35
D. Devenisi Operasional Variabel.....	36
E. Jenis Dan Sumber Data.....	37
F. Tehnik Analisis Data.....	38
1. Uji Kualitas Data.....	38
2. Uji Asumsi Klasik.....	38
3. Regresi Linier Berganda.....	39
4. Uji Hipotesis.....	40
5. Koefisien Determinasi.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumut.....	43
a. Sejarah Singkat.....	43
b. Visi dan Misi.....	44
c. Prioritas Pembangunan Sumut.....	45
d. Kabupaten/Kota Sumut.....	45
2. Analisis Deskriptif.....	46
3. Pengujian Asumsi Klasik.....	50
a. Uji Normalitas Data.....	50
b. Uji Multikolinieritas Data.....	51
c. Uji Autokorelasi.....	52

4. Regresi Linier Berganda.....	53
5. Uji Kesesuaian.....	54
a. Uji Hipotesis Simultan.....	58
b. Uji Hipotesis Parsial.....	55
c. Koefisien Determinasi.....	57
B. Pembahasan.....	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase IPM	6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk	8
Tabel 1.3 Persentase Pengangguran	8
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	27
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	35
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabe.....	36
Tabel 4.1 Data Kabupaten/Kota	45
Tabel 4.2 Data Deskriptif Statistik.....	46
Tabel 4.3 Multikolinieritas.....	52
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda	54
Tabel 4.6 Uji Simultan	55
Tabel 4.7 Uji Parsial.....	56
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Histogram	50
Gambar 4.2 PP Plot	51

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada ALLAH karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara.”

Dalam mempersiapkan proposal ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua (ALM) Ayahanda Ibrahim Rangkuti dan Ibunda (ALM) Siti Aisyah Lubis yang telah melahirkan saya kemuka bumi ini .
2. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Bakhtiar Efendi, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Bapak Dr.Muhammad Toyib Daulay, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing I dan Rahmad Sembiring, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan

arahan dan bimbingan sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dari awal kuliah hingga sekarang ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan proposal ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian, dan terutama sekali lagi kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Mudah-mudahan penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya.

Medan, 07 November 2019

Penulis



Rizki Jamilah Rangkuti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut Bappenas (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf tertentu yang dianggap manusiawi. Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Kemiskinan dan ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) merupakan dua masalah besar yang banyak terjadi di negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali pada Indonesia. Tingginya persentase (%) penduduk miskin dalam suatu wilayah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan pendapatan perkapita mereka rendah. Keadaan ini diperparah lagi jika tingkat pengangguran dalam wilayah tersebut juga tinggi.

Melalui laporan Bank Dunia *World Development Report on Poverty* (1990) telah mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga *front*, yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan miskin; (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi; dan (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik. Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantarannya dapat dibagi menurut waktunya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Menurut Mudrajad (2006) di Indonesia sendiri untuk mengukur banyaknya jumlah penduduk miskin menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran ini dilakukan dengan melihat besar rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. 2.100 kalori per hari digunakan untuk patokan kebutuhan minimum makanan sedangkan untuk kebutuhan *non*-makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Berikut disajikan persentase (%) kemiskinan di Indonesia dalam periode 2009- 2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2009 – 2018 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia Tahun 2018

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2009 – 2018 cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2009-2018,

meskipun terjadi peningkatan kemiskinan pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,13 % dari 10,96 % ditahun 2014 dan sampai pada 2018 mengalami penurunan sebesar 9.66 %.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan dan mulai menampakkan hasil yang cukup baik dengan turunnya tingkat kemiskinan. Akan tetapi kebijakan dan program yang dilaksanakan belum dapat dikatakan optimal karena masih ada terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan strategis di pemerintahan Sumatera Utara tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (*problem* nasional), yakni mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Walaupun demikian, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan semakin menurunkan tingkat kemiskinan.

Gambar 1.2
Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara
Tahun 2009 – 2018 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia Tahun 2018

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami pola yang menurun. Gambar 1.2 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan sebesar 11.27% dan turun menjadi 10.83% pada tahun 2011, kemudian turun kembali menjadi 9.85% di tahun 2014 dan mengalami peningkatan 10.79% pada tahun 2015 kemudian terjadi penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 9.22%.

Keberhasilan provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Tingkat kemiskinan di 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinan masih

tinggi. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia pada Provinsi Sumatera Utara yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 1.1
Persentase IPM Di Sumatera Utara
Tahun 2009-2018

Tahun	IPM (%)
2009	73.80
2010	74.19
2011	74.65
2012	75.13
2013	68.36
2014	68.87
2015	69.51
2016	70.00
2017	70.57
2018	70.16

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia Tahun 2018

Tabel 1.1 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai dengan 2018, yaitu sebesar 73,80% pada tahun 2009 dan mengalami penurunan 68,36% pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2015 naik sebesar 69,51% dan tahun 2016 sebesar 70% sampai pada tahun 2018 sebesar 70,16%.

Lanjouw dkk (dalam Yani Mulyaningsih, 2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi faktor kemiskinan, jumlah penduduk suatu daerah juga merupakan permasalahan mendasar kemiskinan. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Berikut merupakan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Di Sumatera Utara
Tahun 2009-2018

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2009	13.248.386
2010	12.982.204
2011	13.103.596
2012	13.215.401
2013	13.326.307
2014	13.766.851
2015	13.937.797
2016	14.102.911
2017	14.262.100
2018	14.415.400

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia Tahun 2018

Dan berdasarkan tabel 1.2 bahwa jumlah penduduk Sumatera Utara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia (Maier dalam Mudrajad Kuncoro,1997).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Menurut Sadono Sukirno (2000), Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah

tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Tabel 1.3
Persentase Pengangguran Terbuka Di Sumatera Utara
Tahun 2009-2018 (%)

Tahun	Persentase Pengangguran Terbuka
2009	8.45
2010	7.43
2011	8.18
2012	6.28
2013	6.45
2014	6.23
2015	6.71
2016	5.84
2017	5.60
2018	5.56

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia Tahun 2018

Tabel 1.3 menunjukkan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tergolong masih tinggi, tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tidak stabil, mengalami beberapa kali fase naik turun. Pada tahun 2009, tingkat pengangguran sebesar 8,45%, kemudian turun menjadi 6,28% pada tahun 2012 tetapi pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 6,71% dan turun kembali menjadi 5,84% pada tahun 2016 dan ditutup pada tahun 2018 menurun menjadi 5,56%.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2009-2018 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi terjadi peningkatan penduduk dan terjadinya fluktuasi pada tingkat pengangguran terbuka, dimana adanya kontradiksi antara teori dengan kenyataan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 - 2018”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu

- a. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan cukup tinggi yaitu sebesar 11.27% kemudia turun menjadi 10.83% pada tahun 2011, kemudian turun kembali menjadi 9.85% di tahun 2014 dan mengalami peningkatan kembali 10.79% pada tahun 2015 kemudian terjadi penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 9.22%.
- b. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai dengan 2018, yaitu sebesar 73,80% pada tahun 2009 dan mengalami penurunan 68,36% pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2015 naik sebesar 69,51%

dan tahun 2016 sebesar 70% sampai pada tahun 2018 sebesar 70,16%.

- c. Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara mengalami beberapa kali fase naik turun. Pada tahun 2009, tingkat pengangguran sebesar 8,45%, kemudian turun menjadi 6,28% pada tahun 2012 tetapi pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 6,71% dan turun kembali menjadi 5,84% pada tahun 2016 dan ditutup pada tahun 2018 menurun menjadi 5,56%.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulisan penelitian ini dibatasi agar pembahasannya terarah dan tidak meluas serta menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat kemiskinan Pada Provinsi Sumatera Utara

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Apakah ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

4. Apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, merupakan bahan melatih, menulis dan berpikir secara ilmiah dengan menerapkan teori dan *literature* yang ada. Terutama pada bidang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
- b. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

- c. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Hilda Nureni Lubis 2017) dengan judul skripsi “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Ekskaresidenan Kedu, Banyumas, Dan Semarang Tahun 2010-2015” program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia,,Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Provinsi Sumatera Utara .

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya yang dapat dilihat pada table 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya

Perbandingan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Variabel	Variabel Dependen : 1. Kemiskinan Variabel Independen : 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Upah 3. Pengangguran	Variabel Dependen : 1. Tingkat Kemiskinan Variabel Independen : 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Jumlah Penduduk 3. Tingkat Pengangguran Terbuka
Waktu penelitian	Tahun 2017	Tahun 2019
Jumlah sampel	96	165
Lokasi penelitian	Kabupaten/Kota Ekskaresidenan Kedu, Banyumas, Semarang	Provinsi Sumatera Utara
Metode analisis	Analisis Data Panel	Data Time Series

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu fenomena ekonomi yang biasanya terjadi di Negara yang tidak memiliki kekuatan daya saing dan sumber modal berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Setiap pemerintahan selalu berupaya untuk menekan kemiskinan agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi dan konsumsi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki. Pemerintahan yang memiliki daya saing dapat bersaing dan melakukan kegiatan ekonomi dan dapat menekan kemiskinan dengan meningkatkan daya saing baik dari

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang terjadi karena adanya suatu bentuk kekurangan dalam hal sandang, pangan, papan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin hanya dapat memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan menurut Tambunan (2001) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup

untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2) Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3) Kemiskinan Kultur

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

c. Sumber dan Sebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- 1) *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan,
- 2) *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor,
- 3) *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur, sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung,
- 4) *Resources management and the environment*, adalah unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas,

- 5) *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus,
- 6) *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki,
- 7) *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan,
- 8) *Exploatif intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir,
- 9) *Internal political fragmentation and civil strife*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, yang dapat menjadi penyebab kemiskinan,
- 10) *International processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Sharp, *et.al* (dalam Kuncoro, 1997:131) berpendapat penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.

- 1) Secara mikro, kemiskinan yang disebabkan oleh adanya ketimoangan dalam hal sumber daya yang menyebabkan adanya

kesenjangan.

- 2) Kemiskinan yang disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia yaitu ilmu pengetahuan, dan skill yang terbatas menyebabkan daya saing yang rendah.
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan suatu kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

d. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur dengan melihat faktor produksi dan konsumsi yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Setiap Negara memiliki metodenya yang berbeda dalam menentukan ukuran garis kemiskinan sesuai dengan karakteristik daerah tersebut..

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang

pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

e. Karakteristik Kemiskinan

Beberapa karakteristik yang dapat mengukur kemiskinan menurut Supriatna (1997:82), antara lain:

- 1) Tidak tersedianya faktor produksi.
- 2) Tidak adanya potensi memiliki asset.
- 3) Akses pendidikan yang minim.
- 4) Keterbatasan fasilitas yang dimiliki.
- 5) Tidak memiliki kemampuan daya saing berupa keterampilan dan ilmu.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah harapan bagi suatu daerah yang harus dicapai agar masyarakat dapat terhindar dari kemiskinan. Sumber daya manusia dapat diukur Berdasarkan pada angka harapan hidup, pendidikan dan standard hidup yang layak. Setiap daerah memiliki indeks yang berbeda hal ini mencerminkan kualitas hidup di masing masing daerah berbeda sesuai dengan karakteristik daerah dan sumber daya yang dimiliki.

Dengan adanya indeks pembangunan manusia maka setiap daerah dapat diukur kualitas hidupnya dan taraf hidup agar daerah tersebut dapat melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut.

a. Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah tugas pemerintah daerah terkait sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan pembuatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dalam prioritas pembangunan yang dibutuhkan.

Sebagaimana laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata
- 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal
- 4) Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Konsep pembangunan manusia yang diprakarsai dan ditunjang

oleh UNDP ini mengembangkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan pertama sekali pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

b. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

- 1) Indeks Harapan Hidup
- 2) Indeks Pendidikan
- 3) Indeks Standar Hidup Layak

Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Di mana :

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standart Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100.

3. Jumlah Penduduk

Setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda beda hal ini bergantung pada karakteristik daerah tersebut. Jumlah penduduk memiliki potensi dan kontribusi bagi pembangunan ekonomi suatu daerah namun dapat pula menjadi penghambat pembangunan dengan berbagai faktor. Hal ini tentunya jumlah penduduk harus dapat memanfaatkan dengan baik agar tidak menjadi sumber penghambat ekonomi suatu daerah.

Masalah kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya. Kelahiran yang tinggi salah satunya disebabkan oleh usia pernikahan yang masih dini, dan kurangnya pengetahuan akan KB. Sementara itu angka kematian yang tinggi disebabkan oleh masih rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki penduduk Negara sedang berkembang.

Konsep yang populer mengenai ekonomi demografi yaitu konsep transisi demografi. Pada dasarnya konsep ini mencoba menerangkan mengapa hamper semua Negara yang kini tergolong sebagai Negara maju sama-sama telah melewati sejarah populasi modern yang terdiri dari tiga

tahapan besar. Tahap pertama, yaitu masa sebelum modernisasi dimana Negara-negara tersebut memiliki laju pertumbuhan penduduk yang stabil atau sangat lambat. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran dan angka kematian. Tahap kedua, berlangsung setelah adanya modernisasi yang kemudian menghasilkan berbagai metode penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik, makanan yang lebih bergizi, pendapatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas hidup lainnya, sehingga secara perlahan-lahan usia harapan hidup menjadi lebih lama. Akan tetapi penurunan angka kematian tersebut tidak segera diimbangi oleh turunnya angka kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tajam. Tahapan kedua ini menjadi awal dari proses transisi demografi, yaitu dari keadaan stabil atau laju pertumbuhan penduduk yang lambat ke laju pertumbuhan yang terus meningkat dengan cepat, sebelum pada akhirnya kembali ke laju pertumbuhan yang menurun. Terakhir, tahapan ketiga segera berlangsung dengan munculnya berbagai macam dorongan dan pengaruh upaya-upaya modernisasi pembangunan yang menyebabkan turunnya tingkat kelahiran. Pada akhirnya tingkat kelahiran berhasil turun tajam sampai sama rendahnya dengan angka kematian, sehingga secara netto laju pertumbuhan penduduk menjadi sangat rendah atau bahkan nol.

4. Pengangguran

a. Definisi Pengangguran

Pengangguran merupakan fenomena social yang terjadi di suatu daerah karena keterbatasan lapangan kerja sehingga tidak memperoleh kesempatan dalam melakukan kegiatan produksi.

b. Jenis dan Bentuk Pengangguran

Pengangguran itu memiliki jenis dan bentuk yang membedakannya satu sama lain Sadono Sukirno (2000), antara lain :

- 1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- 2) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
- 3) Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Pakar lain menuturkan beberapa bentuk pengangguran Edwards (1974) adalah:

- 1) Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
- 2) Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak

mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.

- 3) Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
- 4) Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

- 1) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.
- 2) Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka sekarang ini yang ada di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia rata-rata sekitar 10 persen dari seluruh angkatan kerja di perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius

lagi bagi mereka yang berusia antara 15 - 24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dibuat untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya sama dengan penelitian yang akan dibuat. Sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil – hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu :

Tabel 2.1
Peneliti Sebelumnya

No	Nama Tahun /	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Hilda Nureni Lubis (2017)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IpM), Upah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Ekskaresidenan Kedu, Banyumas, Dan Semarang Tahun 2010-2015	Variabel X: 1. IPM 2. Upah 3. Pengangguran Variabel Y: 1. Kemiskinan	Analisis Data Panel	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan rsquared sebesar 98,97%, variabel IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena signifikansi variabel IPM sebesar 0,1670 dimana lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan, Upah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sebesar 0,0004 karena di 16

					<p>kabupaten dan kota di Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang lebih banyak bekerja di sektor formal sehingga upah sangat berpengaruh terhadap kemiskinan pada tahun 2010-2015. dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan sebesar 0,0307 dikarenakan banyak lapangan kerja yang meraaup tenaga kerja yang lebih banyak semacam umkm.</p>
2.	Achmad Khabhibi (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Upah Minimum 3. Tingkat Pengangguran <p>Variabel Y:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kemiskinan 	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan dengan uji terhadap koefisien regresi secara parsial (uji t) dengan $\alpha = 5\%$ menunjukkan dua variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota dan tingkat pengangguran, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil Uji F dengan $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p>
3.	Prima Sukmaraga (2011)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPM 2. PDRB 3. Jumlah 	Metode penelitian menggunakan <i>Ordinary Least Square</i>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah</p>

		Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah	Pengangguran Variabel Y: 1. Jumlah Penduduk Miskin	(OLS)	penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
4.	Ravi Dwi Wijayanto (2010)	Analisis Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005 - 2008	Variabel X: 1. PDRB 2. Pendidikan 3. Pengangguran Variabel Y: 1. Kemiskinan	Analisis Data Panel	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
5.	Ari Widiastuti	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008	Variabel X: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Jumlah Penduduk 3. Pendidikan 4. Desentralisasi Fiskal Variabel Y: Kemiskinan	Analisis Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel jumlah penduduk dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

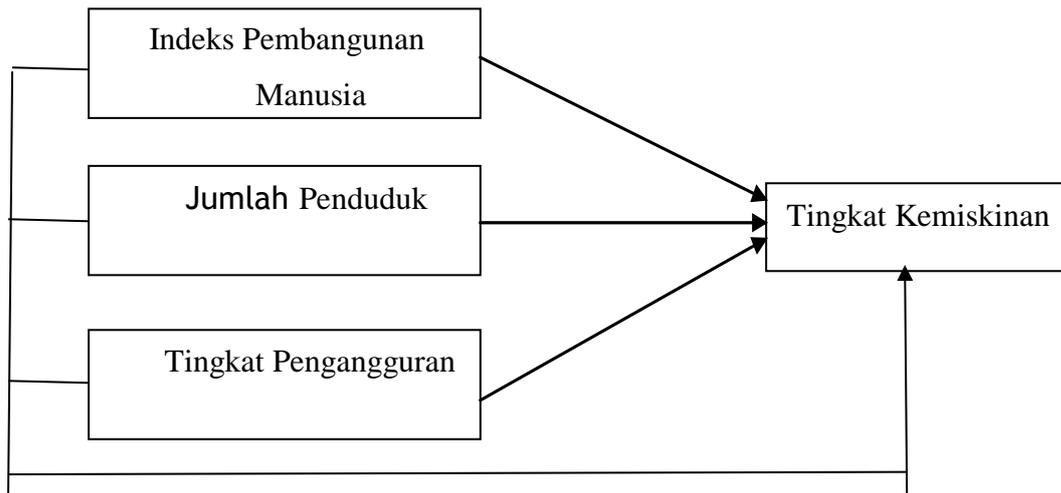
6.	Adit Agus Prastyo	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)	Variabel X: 1.Pertumbuhan Ekonomi 2.Pengangguran 3.Pendidikan Variabel Y: Kemiskinan	Analisis Data Panel	hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan.
7.	Whisnu Adhi Saputra	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Ipm, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Variabel X: 1.Jumlah Penduduk 2.PDRB 3.IPM 4.Pengangguran Variabel Y: Kemiskinan	Analisis Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah
8.	Riana Puji Lestari	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015	Variabel X: 1.IPM 2.Pengangguran 3.PDRB Variabel Y: Kemiskinan	Analisis Data Panel	hasil analisis penelitian diperoleh hasil bahwa : secara parsial dengan menggunakan alat analisis <i>Fixed Effect Model</i> menghasilkan bahwa IPM berpengaruh secara negatif tidak signifikan (-0,130407) yaitu setiap kenaikan IPM 1 (satu) akan menurunkan kemiskinan 130 jiwa, Pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan (-0,003008) artinya setiap peningkatan faktor pengangguran sebesar 1 (satu) akan menurunkan kemiskinan sebesar 3 jiwa. PDRB berpengaruh negatif

					dan tidak signifikan (-0,334386) artinya setiap peningkatan faktor pengangguran sebesar 1 (satu) akan menurunkan kemiskinan sebesar 334 jiwa. Sedangkan dilihat secara simultan IPM, Pengangguran dan PDRB berpengaruh terhadap Kemiskinan di provinsi Lampung.
9.	Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Variabel X: 1. Belanja Publik 2. PDRB 3. Pengangguran Variabel Y: Kemiskinan	Analisis Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.
10.	Rahmad Sembiring	Dampak perubahan social dalam mempengaruhi dan kemiskinan keluarga nelayan desa Pahlawan kec. Tanjung tiram kab. Batubara	Variabel X: 1. Tingkat kesejahteraan 2. Daya beli nelayan Variabel Y: Nilai tukar nelayan	Analisis Regresi linier berganda	Hasil Penelitian : 1. Metode yang digunakan dalam mengestimasi determinan nelayan di Kelurahan pahlawan kecamatan Tanjung tiram sangat baik, karena model terbebas dari pelanggaran asumsi klasik juga karena variasi kemampuan variabel variabel penjelas dalam menjelaskan pendapatan nelayan tergolong tinggi. 2. Variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan pahlawan. Hal ini disebabkan bahwa pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan. Sementara variabel lain yang mempengaruhi pendapatan nelayan adalah

					<p>variabel kesehatan $\alpha = 10\%$ 3. Berdasarkan uji serempak (simultan) variabel-variabel eksplanatori yang digunakan berpengaruh sangat signifikan pada $\alpha = 1\%$ terhadap penghasilan nelayan di desa pahlawan. Dari koefisien masing-masing variabel maka, dapat disimpulkan bahwa tingkat elastisitas faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan nelayan di desa pahlawan kecamatan Tanjung Tiram cukup elastis.</p>
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pikiran mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi Sumatera Utara.



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara, yang kebenarannya masih harus dibuktikan. Jawaban sementara ini merupakan masih titik tolak untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan perumusan masalah, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Sumatera Utara.
2. Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Sumatera Utara.
3. Tingkat Pengangguran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Sumatera Utara.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal (*causal*), Umar (2008) menyebutkan desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Rusiadi (2013:14), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan dari bulan April 2019 sampai dengan selesai, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

Aktivitas	Bulan/Tahun											
	April-Mei 2019			Juni-Juli 2019			Agustus-September 2019			Oktober-November, 2019		
Riset awal/Pengajuan Judul	■	■	■									
Penyusunan Proposal				■	■	■						
Seminar Proposal							■	■	■			
Perbaikan Acc Proposal									■			
Pengolahan Data									■			
Penyusunan Skripsi										■	■	■
Bimbingan Skripsi											■	■
Meja Hijau												■

Sumber: Penulis (2019)

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi yang kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2012).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data IPM, jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 (5 tahun).

D. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama Index Pembangunan Manusia (X_1), variabel bebas kedua Jumlah Penduduk(X_2), variabel bebas ketiga Tingkat Pengangguran (X_3), dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Tingkat Pengangguran (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Deskripsi	skala
Indeks Pembangunan Manusia (X_1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Data IPM yang digunakan adalah data IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 sampai 2018 (dalam satuan persen), data diambil dari BPS.	asio
Jumlah Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Sumatera Utara	nominal

(X2)	selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap tahun 2009 sampai 2018 (dalam satuan jiwa), data diambil dari BPS.	(N o m in al)
Tingkat Pengangguran (X3)	Persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2009 sampai 2018 yang diukur (dalam satuan persen), data diambil dari BPS.	as io
Tingkat Kemiskinan (Y1)	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2009 sampai 2018 (dalam satuan persen), data diambil dari BPS.	as io

Sumber: Penulis (2016)

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Data tersebut berupa laporan jumlah penduduk, index pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

2. Sumber Data

Sumber penelitian ini yaitu www.bps.go.id. Periode data penelitian ini meliputi data dari tahun 2013 sampai 2017.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier yang berbasis *ordinary least square* (OLS).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Uji normalitas dilakukan pada nilai residual model. Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan pemeriksaan output normal P-P plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika penyebaran titik-titik output plot mengikuti garis diagonal plot.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel bebas dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang lainnya.

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu :

Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 (atau dibawah 10) dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 (di atas 0,1), maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2.

2. Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan program *Statistical Product Service Solution (SPSS)* versi 16.0. Analisis regresi digunakan untuk meramalkan variabel terikat (Y) berdasarkan suatu variabel bebas (X) dalam suatu persamaan linier.

Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Profitabilitas

α = Nilai Y apabila $X_1 = X_2 = 0$ (konstanta)

b = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regrestion*)

X_1 = Hutang (*Independent Variabel*)

X_2 = Piutang (*Independent Variabel*)

e = error

3. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Index Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada tingkat kepercayaan (*Confidence Interval*).

Hipotesis untuk pengujian secara simultan adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara serempak (Index Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran).

$H_a : \text{minimal } 1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan secara serempak (Index Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran).

Pengujian menggunakan uji F dengan kriteria pengambilan keputusan (KPK) adalah:

Terima H_0 (tolak H_a), apabila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau $\text{Sig } F > \alpha$ 5%.

Tolak H_0 (terima H_a), apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha 5\%$.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas (hutang dan piutang) terhadap variabel terikat (profitabilitas). Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, dilakukan uji t, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1) Pengaruh Index Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya Index Pembangunan Manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya Index Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

2) Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan.

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya Jumlah Penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, artinya Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

3) Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan.

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya Tingkat Pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, artinya Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan (KPK) adalah:

Terima H_0 (tolak H_a), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig t > \alpha 5\%$.

Tolak H_0 (terima H_a), apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha\ 5\%$.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara

a. Sejarah Ringkas

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang

diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

b. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

1) Visi

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat

2) Misi

- a) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- b) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- c) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- d) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- e) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab

c. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara

- 1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
- 2) Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
- 4) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
- 5) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

d. Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Nias	18	Kabupaten Serdang Berdagai
2	Kabupaten Mandailing Natal	19	Kabupaten Batu bara
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	20	Kabupaten Padang lawas utara
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	21	Kabupaten Padang lawas
No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
5	Kabupaten Tapanuli Utara	22	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
6	Kabupaten Toba Samosir	23	Kabupaten Labuhan Batu Utara
7	Kabupaten Labuhan Batu	24	Kabupaten Nias Utara
8	Kabupaten Asahan	No	Kabupaten/Kota
9	Kabupaten Simalungun		
10	Kabupaten Dairi	25	Kabupaten Nias Barat

11	Kabupaten Karo	26	Kabupaten Sibolga
12	Kabupaten Deli Serdang	27	Kota Tanjung Balai
13	Kabupaten Langkat	28	Kota Pematang Siantar
14	Kabupaten Nias Selatan	29	Kota Tebing Tinggi
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	30	Kota Binjai
16	Kabupaten PakPak Barat	31	Kota Medan
17	Kabupaten Samosir	32	Kota Padang Sidempuan
		33	Kota Gunung sitoli

Sumber : <http://www.sumutprov.go.id>

2. Analisis Deskriptif

Tabel 4.2 Data Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	165	56.58	79.98	68.3369	4.87323
JP	165	10.65	14.63	12.5577	.83425
TP	165	.15	19.21	5.4201	3.40893
TK	165	12.24	13.11	12.6405	.16361
Valid N (listwise)	165				

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui data deskriptif Index Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk (JP), Tingkat Pengangguran (TP) dan Tingkat Kemiskinan (TK) Kabupaten/Kota Provinsi

Sumatera Utara selama 2013-2017 dari Jumlah N (sampel) pada penelitian ini adalah 33 Kabupaten Kota dikali 5 tahun yaitu sebesar 165.

Nilai minimum untuk variabel Index Pembangunan Manusia (IPM) yaitu 58,58 yang merupakan IPM kabupaten Nias Barat pada tahun 2013 hal ini menggambarkan bahwasannya indeks pembangunan manusia di kabupaten Nias Barat rendah dibanding dengan IPM rata-rata Sumatera Utara yang sebesar 68,36 di tahun 2013. Nilai maksimum untuk variabel Index Pembangunan Manusia (IPM) yaitu 79,98 yang merupakan IPM kota Medan pada tahun 2017 hal ini menggambarkan bahwasannya indeks pembangunan manusia di kota Medan paling tinggi dibandingkan dengan IPM rata-rata provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 yang sebesar 70,57. Index pembangunan manusia di kota Medan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menggambarkan bahwasannya kota Medan unggul dalam hal pembangunan kualitas manusia baik dari sisi pendidikan, pengetahuan, dan tingkat kesehatan. Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Nilai minimum untuk variabel Jumlah Penduduk (JP) yaitu 10,65 atau 42144 penduduk yang merupakan JP kabupaten Pakpak Barat pada tahun 2013 hal ini menggambarkan bahwasannya jumlah penduduk di kabupaten Pakpak Barat paling kecil dibanding dengan Jumlah Penduduk Sumatera Utara yang sebesar 14332612 di tahun 2013. Nilai maksimum untuk variabel Jumlah Penduduk (JP) yaitu 14,63 atau 2247425 penduduk

yang merupakan JP kota Medan pada tahun 2017 hal ini menggambarkan bahwasannya Jumlah Penduduk (JP) di kota Medan paling tinggi dibandingkan dengan Jumlah Penduduk (JP) kabupaten dan kota lainnya di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 yaitu dengan jumlah total mencapai 14262147 jiwa penduduk.

Penduduk kota Medan cukup produktif dibandingkan penduduk kabupaten atau kota lainnya sehingga menyebabkan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan melonjak. Peningkatan jumlah penduduk ini harusnya menjadi potensi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki yaitu jumlah penduduk yang banyak dalam hal pembangunan namun perlu disadari bahwasannya peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi beban sendiri bagi pemerintah daerah dalam hal pembangunan apabila jumlah penduduk tersebut tidak dimanfaatkan dengan efektif dalam hal pembangunan.

Nilai minimum untuk variabel Tingkat Pengangguran (TP) yaitu 0,15 yang merupakan TP kabupaten Nias pada tahun 2016 hal ini menggambarkan bahwasannya tingkat pengangguran di kabupaten Nias paling kecil dibanding dengan tingkat pengangguran Sumatera Utara yang sebesar 5,84 di tahun 2013. Nilai maksimum untuk variabel tingkat pengangguran (TP) yaitu 19,21 yang merupakan TP kota Sibolga pada tahun 2016 hal ini menggambarkan bahwasannya tingkat pengangguran (TP) di kota Sibolga paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran (TP) kabupaten dan kota lainnya di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 yaitu dengan jumlah mencapai 5,84. Tingkat pengangguran yang tinggi

merupakan suatu fenomena social yang menjadi masalah bagi pemerintah daerah karena dapat berpotensi pada meningkatnya jumlah penduduk miskin karena tidak adanya pekerjaan. Yang menjadi masalah bagi pemerintah daerah adalah tidak terserapnya jumlah penduduk di dunia kerja sehingga menyebabkan banyak penduduk yang menganggur. Adapun dampak dari jumlah penduduk yang menganggur yaitu potensi fenomena gejala social seperti kriminalitas yang tinggi dan jumlah kemiskinan yang meningkat.

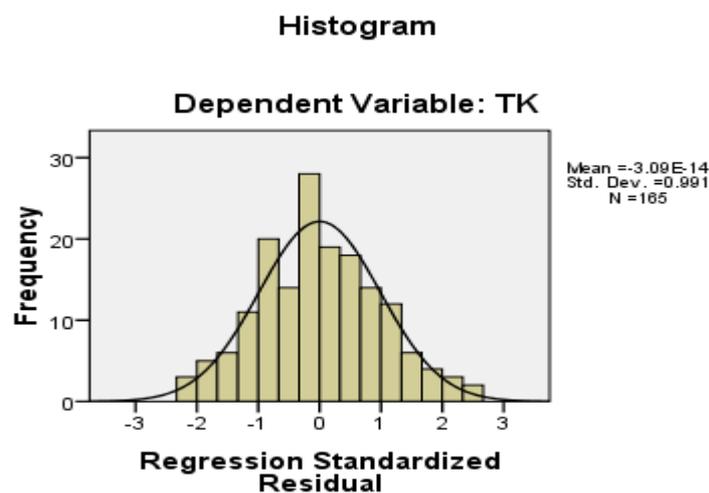
Nilai minimum untuk variabel Tingkat Kemiskinan (TK) yaitu 12,24 atau 207796 penduduk yang merupakan TK kabupaten Pakpak Barat pada tahun 2013 hal ini menggambarkan bahwasannya tingkat kemiskinan di kabupaten Pakpak Barat paling kecil dibanding dengan tingkat kemiskinan rata-rata provinsi Sumatera Utara yang sebesar 311063 di tahun 2013. Nilai maksimum untuk variabel Tingkat Kemiskinan (TK) yaitu 13,11 atau 491496 penduduk yang merupakan TK kota Medan pada tahun 2017 hal ini menggambarkan bahwasannya Jumlah Penduduk (TK) di kota Medan paling tinggi dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan (TK) kabupaten dan kota lainnya di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 yaitu dengan jumlah total mencapai 411345 jiwa penduduk. Jumlah penduduk miskin di kota Medan merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadi masalah serius bagi pemerintahan kota Medan dalam hal pengelolaan APBD agar proses pembangunan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di kota Medan. Peningkatan jumlah penduduk miskin di kota Medan diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk kota Medan setiap

tahunnya. Hal ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk kota Medan setiap tahunnya sehingga berkontribusi pada jumlah penduduk miskin yang meningkat.

Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi indikator bahwasannya pemerintah daerah telah gagal dalam melakukan dan pengelolaan sumber daya APBD dalam hal melakukan pembangunan daerah sehingga dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah daerah tersebut.

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

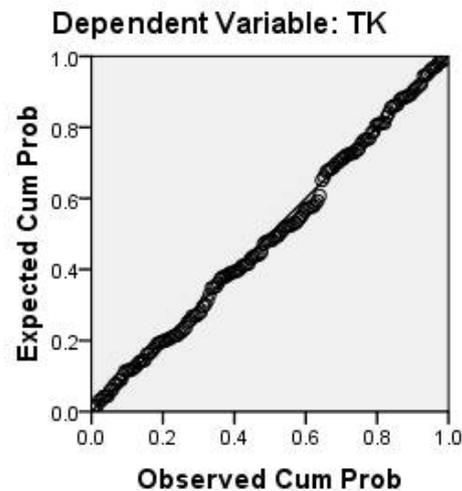


Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data untuk variabel s menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari kedua gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel Index Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai

tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dari hasil data yang telah didistribusikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error		Tolerance	Vif
(Constant)	12,179633	0,175464			
IPM	-0,00038	0,00023	-0,114772	0,999801	1,000000
JP	0,029285	0,014234	0,149330	0,938883	1,065556
TP	0,017924	0,003483	0,373477	0,938965	1,065556

a. Dependent Variable: TK
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah Index Pembangunan Manusia $1,000 < 10$, Jumlah Penduduk $1,065 < 10$, dan Tingkat Pengangguran $1,065 < 10$ dan nilai *Tolerance Index* Pembangunan Manusia $0,999 > 0,1$, Jumlah Penduduk $0,938 > 0,1$, dan Tingkat Pengangguran $0,938 > 0,1$ sehingga terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Durbin-Watson
1	0,4513	0,2037	0,1889	0,1473	0,2037	0,7891

a. Predictors: (Constant), TP, IPM, JP

b. Dependent Variable: TK

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa angka Durbin Watson $0,901 < 2$, sehingga terbebas dari autokorelasi

4. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan *software* komputer yaitu SPSS

(Statistical Package for Social Science) versi 16,0 (Ghozali, 2009). Maka model yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	Vif
(Constant)	12,179633	0,175464		69,4140	0,0000		
IPM	-0,000038	0,000023	-0,114772	-1,6318	0,1047	0,999801	1.000
JP	0,029285	0,014234	0,149330	2,0574	0,0413	0,938883	1.065
TP	0,017924	0,003483	0,373477	5,1459	0,0000	0,938965	1.065

a. Dependent Variable: TK

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai

$$\text{berikut } Y = 12,17 - 0,000 X_1 + 0,029 X_2 + 0,017 X_3 + e.$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka nilai Tingkat Kemiskinan (Y) adalah sebesar 12,17%.
- 2) Jika terjadi peningkatan Index Pembangunan Manusia sebesar 1% , maka Tingkat Kemiskinan (Y) akan menurun sebesar 0,0%
- 3) Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 , maka Tingkat Kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar 2,9%.
- 4) Jika terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran sebesar 1 % , maka Tingkat Kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar 1,7%.

5. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($=0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan formula H_0 dan H_a adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.894	3	.298	13.728	.000 ^a
	Residual	3.496	161	.022		
	Total	4.390	164			

a. Predictors: (Constant), TP, IPM, JP

b. Dependent Variable: TK

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 13,278 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,66 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,010 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima. Dalam penelitian ini Index Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.7 Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	12,179633	0,175464		69,4140	0,0000
IPM	-0,000038	0,000023	-0,114772	1,6318	0,1047
JP	0,029285	0,014234	0,149330	2,0574	0,0413
TP	0,017924	0,003483	0,373477	5,1459	0,0000

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa:

- 1) Pengaruh Index Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. t > \alpha$

Nilai t_{hitung} sebesar 1,631 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,654 dan signifikan sebesar 0,104, sehingga $t_{hitung} 1,631 < t_{tabel} 1,654$ dan signifikan $0,104 > 0,05$, maka Ha ditolak dan H0 diterima, yang menyatakan Index Pembangunan Manusia

tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t > \alpha$

Nilai t_{hitung} sebesar 2,057 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,654 dan signifikan sebesar 0,041, sehingga $t_{hitung} 2,057 > t_{tabel} 1,654$ dan signifikan $0,041 < 0,05$, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

- 3) Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t > \alpha$

Nilai t_{hitung} sebesar 5,145 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,654 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga $t_{hitung} 5,145 > t_{tabel} 1,654$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

c. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas (Index Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran) terhadap variabel terikat (Tingkat Kemiskinan). Dari pengolahan data dengan menggunakan alat bantu aplikasi *Software SPSS 16.0 for Windows* maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Durbin-Watson
1	0,4513	0,2037	0,1889	0,1473	0,2037	0,7891

- a. Predictors: (Constant), TP, IPM, JP
- b. Dependent Variable:
TK

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa angka *adjusted R Square* 0,188 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 18,8% Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh Index Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran sedangkan sisanya $100\% - 18,8\% = 81,2\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model penelitian seperti kepadatan penduduk, luas wilayah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, inflasi, Produk Domestik Regional Bruto atau variable lainnya.

B. Pembahasan.

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Nilai t_{hitung} sebesar 1,631 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,654 dan signifikan sebesar 0,104, sehingga $t_{hitung} 1,631 < t_{tabel} 1,654$ dan signifikan $0,104 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, yang menyatakan Index Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hilda Nureni Lubis (2017) yang menyatakan bahwasannya Index Pembangunan Manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prima Sukma Raga (2011) yang menyatakan bahwasannya Index Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dari perbandingan hasil penelitian tersebut terjadi inkonsistensi hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dibatasi pada penelitian dan perbedaan karakteristik dari objek penelitian.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwasannya prosesn pembangunan oleh pemerintah daerah kabupataen dan kota di Provinsi Sumatera Utara tidak terlalu signifikan atau efektif dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan. Index pembangunan manusia mencerminkan angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari

sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat *non*-fisik (intelektualitas). Dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan masyarakat, ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

2. Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk Terhadap tingkat Kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara

Nilai t_{hitung} sebesar 2,057 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,654 dan signifikan sebesar 0,041, sehingga $t_{hitung} 2,057 > t_{tabel} 1,654$ dan signifikan $0,041 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aris Widiastuti (2010) dan Wishnu Adi Saputra (2013) yang menyatakan bahwasannya jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwasannya jumlah penduduk yang meningkat menjadi kontribusi bagi tingkat kemiskinan yang meningkat pula. Artinya bahwa pemerintah daerah kota atau kabupaten tidak dapat memanfaatkan jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam proses pembangunan di daerah tersebut. Peningkatan jumlah penduduk dari segi kuantitas di provinsi Sumatera Utara tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk berupa intelektual, kesehatan, ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjadi ancaman berupa

ledakan penduduk yang tidak berkualitas yaitu penduduk yang tidak mandiri dan produktif. Pada akhirnya jumlah penduduk yang tinggi tersebut menjadi contributor bagi tingkat kemiskinan yang tinggi pula, hal ini tentunya menjadi bahaya karena jumlah penduduk yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berpotensi pada gejala social lainnya seperti meningkatnya kriminalitas dan menjadi sumber permasalahan baru bagi pemerintah daerah.

3. Pengaruh Variabel Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Nilai t_{hitung} sebesar 5,145 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,654 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga $t_{hitung} 5,145 > t_{tabel} 1,654$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilda Nureni Lubis (2017) dan Achmad Khabibi (2013) yang menyatakan bahwasannya tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi contributor bagi terciptanya kemiskinan baru di daerah Provinsi Sumatera Utara. Tingkat pengangguran mencerminkan kondisi jumlah penduduk pada usia angkatan kerja yang tidak produktif. Tingkat pengangguran tinggi dapat disebabkan oleh kurangnya serapan tenaga kerja atau kurangnya daya saing penduduk di Provinsi Sumatera Utara sehingga banyak penduduk yang menganggur. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi cerminan bahwasannya sumber

daya manusia yang ada di daerah kabupaten kota provinsi Sumatera Utara tidak produktif. Jumlah penduduk angkatan kerja yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap tenaga kerja menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam hal menekan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.

4. Pengaruh Variabel Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Index Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Index pembangunan manusia menginterpretasikan tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui proses pembangunan yang direncanakan melalui realisasi APBD yang disusun oleh kepala pemerintah daerah. Semakin baik index pembangunan manusia dapat berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar dapat berdampak pada tingkat kemiskinan karena pemerintah daerah tidak dapat memastikan tingkat kesejahteraan mereka melalui penyediaan lapangan kerja sehingga dengan banyaknya jumlah penduduk berpotensi pada

peningkatan pengangguran yang pada akhirnya masyarakat menjadi tidak produktif. Hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah dengan adanya fenomena tingkat kemiskinan yang semakin tinggi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Index pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara
4. Index pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara harus dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan Blanja Daerah secara efektif agar dapat meningkatkan index pembangunan manusia sehingga terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berintelektual, dan sehat. Adapun alokasi yang harus ditingkatkan yaitu di bidang pendidikan dengan memberikan pendidikan yang murah dan gratis bagi

yang tidak mampu dan meningkatkan fasilitas sekolah dan memperbanyak lembaga pendidikan non formal agar masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Adapun dari sisi kesehatan yaitu memberikan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan fasilitas umum di daerah kabupaten atau kota haruslah berlandaskan pada kebutuhan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi tempat rekreasi dan menjunjung tinggi adat dan budaya setempat agar masyarakat menjadi bahagia, sejahtera dan produktif.

2. Jumlah penduduk dapat ditekan melalui sosialisasi program keluarga berencana dan keluarga sehat. Pemerintah daerah harus dapat memastikan dan menekan jumlah penduduk usia dini dengan memberikan sosialisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya persiapan yang matang sebelum menikah yaitu memberikan pencerahan bahwasannya selain siap secara fisik dan mental sebelum menikah masyarakat harus disadarkan pada pentingnya peningkatan ilmu pengetahuan dan ekonomi agar tercipta keluarga yang mapan dan bahagia. Jumlah penduduk yang banyak harusnya menjadi potensi bagi daerah tersebut dalam hal pembentukan kualitas penduduk dari sisi ilmu pengetahuan dan kesehatan agar secara kuantitas dan kualitas penduduk tersebut menjadi produktif dan berkontribusi bagi peningkatan ekonomi bukannya pada tingginya tingkat kemiskinan penduduk.
3. Agar dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara maka Pemerintah daerah perlu

menciptakan lapangan kerja baik dari BUMD atau melalui investasi asing dalam pengelolaan kekayaan daerah Pemerintah daerah harus aktif dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap melihat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang, pemerintah juga perlu mengkaji ulang sector sektor unggulan mana saja yang perlu ditingkatkan alokasi dananya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Selain membuka lapangan kerja, pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan potensi Sumber Daya Manusia angkatan kerja dengan cara meningkatkan SDM melalui pendidikan dan keterampilan. Maka pemerintah daerah harus focus dalam hal penigkatan ilmu pengetahuan, keterampilan agar tercipta lapangan kerja baru dan masyarakat mampu membuka peluang usaha menjadi seorang enterpreneur.

4. Pemerintah daerah harus dapat fokus dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan melaksanakan proses pembangunan daerah secara efektif yaitu dengan merealisasikan APBD yang disusun secara baik. Pemerintah daerah harus focus dalam menurunkan jumlah penduduk agar tidak tercipta permasalahan baru yaitu timbulnya pjumlah penduduk yang menganggur yang pada ahirnya dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Tingkat pengangguran dapat ditekan dengan cara membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh pekerjaan sehingga masyarakat menjadi lebih produktif dan tingkat kemiskinan dapat diturunkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Widiastuti. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Adit Agus Prastyo. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- BAPPENAS. 2010. *Laporan Pencapaian Tujuan pembangunan Milenium Indonesia 2010*. BAPPENAS atau KPPN
- Badan Pusat Statistik. *Data dan Informasi Kemiskinan berbagai tahun, Badan Pusat Statistik Indonesia*, Jakarta
- Chriswardani, Suryawati. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal: Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*. Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).
- Fadly, Y. (2011). An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hidayat, R. (2018). KEMAMPUAN PANEL AUTO REGRESSIV DISTRIBUTED LAG DALAM MEMPREDIKSI FLUKTUASI SAHAM PROPERTY AND REAL ESTATE INDONESIA. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Hilda Nureni Lubis. 2017. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Ekskaresidenan Kedu, Banyumas, Dan Semarang Tahun 2010-2015. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Khabibi, Achmad. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang
- Kholik, K. (2017). THE EFFECT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ON WORK PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. ALFO CITRA ABADI MEDAN.
- Kholik, K. (2018, October). Effect of Self-Eficacy and Locus of Control on Small and Medium Entertainment Small Scale. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 214-225).
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Maisyarah, R. (2018). Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 760-770.

- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). The Effect of Rice Subsidy on The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.
- Pakpahan, M. (2018). STRATEGI MEINGKATKAN MINAT BELI ULANG APTEK TERHADAP PRODUK OBAT PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABS MEDAN. *JUMANT*, 6(1), 49-56.
- Priyatno, D. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Jakarta: Mediakom
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Purba, R. B. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ravi Dwi Wijayanto. 2010. Analisis Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008 *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Riana Puji Lestari. 2013. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Ritonga, M. (2018). FAKTOR MANAJEMEN BIAYA DAN MANAJEMEN PEMASARAN TERHADAP PENDAPATAN MELALUI INTENSITAS PRODUKSI PADA UKM INDUSTRI RUMAHAN DI KOTA BINJAI. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Ario, F. (2018). *Consumer Behaviour In Era Millennial*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang
- Sarwono, J. 2012. *Pendekatan Kuantitatif Dengan SPSS*. Jakarta: Elexmedia Komputindo
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.

- Setiawan, A. (2018). PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 191-203.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukmaraga, Prima. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro
- Tulus Tambunan. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Jakarta.
- Waruwu, A. A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Stres Kerja dan Konflik Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Kepada Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *JUMANT*, 10(2), 1-14.
- Whisnu Adhi Saputra. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Ipm, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro
- World Bank. 2006. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. available:
- Zamzam. 2011. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar
- <http://www.worldbank.org>.
<http://wikipedia.com>